





**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 12 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **DANIEL FERDIANTO**
N I M : 17.C1.0117
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA)**
S E M A R A N G
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur
Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 28 Januari 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**" TINJAUAN TENTANG PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI PERSIDANGAN
SECARA ONLINE (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KOTA
SEMARANG) "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor

Semarang
WAKIL KETUA



ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH., MH.
NIP. 19650521 199212 1 001

Foto Dokumentasi saat Penelitian
Lokasi: Pengadilan Negeri Semarang



Hasil Plagscan



6.33% PLAGIARISM APPROXIMATELY

7.06% IN QUOTES 

Report #13021389

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki beragam kebudayaan dan sistem hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usaha penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terpisahkan dari usaha untuk membangun meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, sebagian besar aspek kehidupan bernegara bangsa Indonesia diatur berdasarkan hukum. Dalam upaya terwujudnya negara hukum, maka yang diperlukan perangkat hukum baik dalam bentuk yang tertinggi seperti Konstitusi sampai ke bentuk yang teknis agar masyarakat dan penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum memiliki pedoman dalam bertingkah laku dan bertindak sesuai hukum tersebut. Perundang-undangan memiliki peranan penting di

REPORT CHECKED
#130213894 MAY 2021, 12:31 PM AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE
1 OF 71